

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan dinilai sebagai tahapan atau proses akhir yang ditemukan dalam melakukan kegiatan akuntansi yang dinilai mempunyai peran yang begitu sangat esensial guna memunculkan kontribusinya dalam melakukan proses pengukuran dan juga penilaian tingkat kinerja yang mampu dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Diketahui pula bahwa laporan keuangan dinilai sebagai proses atau tahapan kegiatan yang dilakukan dengan adanya melakukan proses penyusunan dan juga penyajian terstruktur dari keadaan atau posisi dari keuangan dan juga terkait hasil dari tingkat kinerja keuangan yang mampu dihasilkan oleh suatu entitas dalam periode tertentu (Tengko *et al.*, 2022).

Dipahami selanjutnya bahwa kualitas laporan keuangan yang dimiliki oleh sebuah entitas begitu sangat bergantung atau adanya hubungannya terkait seberapa besar manfaat atau kegunaan informasi yang diberikan dalam hal ini bagi para pihak yang posisinya memerlukannya guna dijadikan sebagai alat yang membantunya melakukan proses penentuan atau pengambilan suatu tindakan atau keputusan dan juga terkait bagaimana pihak entitas melakukan proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukannya mengacu atau berlandaskan pada kerangka konseptual dan juga memakai kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip dasar serta juga tujuan akuntansi. Dalam hal ini, maka salah satu entitas yang melakukan kegiatan usahanya dalam bidang keuangan yang masih ada saat ini ialah lembaga koperasi.

Koperasi dinilai sebagai lembaga yang didirikan atau dibangun berladaskan adanya perkumpulan atau organisasi ekonomi yang memiliki anggota yang mencakup orang-orang atau juga badan yang di dalam hal ini melakukan kegiatan kerja sama yang dilakukan dengan secara kekeluargaan pada saat menjalankan kegiatan usaha dengan adanya maksud melakukan proses peningkatan pada kesejahteraan yang akan diterima oleh para anggotanya. Selain itu, maka dalam hal ini juga dipahami bahwa koperasi dijadikan sebagai tempat atau wadah guna melakukan penggabungan secara bersama dan melakukan upaya atau usaha dengan secara berbarengan bersama agar setiap kekurangan yang terjadi di dalam kegiatan ekonomi mampu untuk diatasi dengan melakukan kerja sama.

Diketahui bahwa pada masa saat ini, lembaga koperasi posisinya telah berhasil menduduki tempat yang posisinya juga dianggap penting dalam tatanan system perekonomian sebab mampu memberikan pembuktian telah berhasil menghadirkan adanya terjadi perubahan yang tampak di dalam struktur ekonomi (Setiawan, 2020). Pada masa dewasa saat ini, maka diketahui lembaga koperasi terus melakukan perkembangan dengan begitu sangat pesat, dimana hal ini juga didasarkan pada betapa pentingnya peran yang dimiliki oleh lembaga koperasi ini dalam membantu dan juga mendukung perkembangan ekonomi nasional. Dengan adanya kehadiran lembaga koperasi ini, maka begitu sangat dirasakan peran dan juga manfaat yang diberikannya di dalam menghimpun sejumlah dana dari berbagai kalangan masyarakat dan melakukan kegiatan penyaluran sejumlah dana ini secara kembali yang dirubah dalam bentuk berupa pinjaman atau kredit kepada

berbagai kalangan masyarakat maupun pada lembaga atau badan usaha yang posisinya memerlukan sumber modal atau dipakai untuk sumber pembiayaan (Slahanti *et al.*, 2021).

Perkembangan koperasi yang begitu pesat tentunya membutuhkan penyusunan laporan keuangan yang informatif agar dapat digunakan oleh pengguna laporan. Akan tetapi, permasalahan yang terjadi bahwa masih banyaknya koperasi yang belum melakukan kegiatan penyusunan dan juga pembuatan laporan keuangan yang mampu selaras dengan kaidah-kaidah atau standar akuntansi yang dipakai acuan yang wajib untuk dipatuhi. Kondisi yang terjadi dalam hal ini, maka tentunya telah memperlihatkan tingkat kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh lembaga koperasi tidak optimal dan menimbulkan celah adanya kesalahan pencatatan maupun kecurangan dalam pengelolaan keuangan koperasi.

Banyak koperasi yang telah berkembang di Provinsi Bali. Sampai dengan Desember 2022 tercatat sejumlah 5.394 koperasi yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Bali. Dari jumlah tersebut tercatat sejumlah 1.134 koperasi telah tidak aktif. Secara persentase, koperasi yang tidak aktif sebesar 21 persen dari keseluruhan koperasi yang ada di Bali. Mengacu pada perolehan data yang didapatkan sumbernya dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali yang memaparkan terkait kondisi atau keadaan perkembangan data lembaga koperasi yang ada di dalam tingkat provinsi sampai per 31 Desember Tahun 2021-2022, maka berhasil dalam hal ini didapatkan informasi bahwa terdapat peningkatan jumlah koperasi pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya.

Jumlah koperasi aktif meningkat sebanyak 635 koperasi atau sebesar 17,5 persen dari tahun 2021. Akan tetapi, jumlah SHU yang diperoleh menurun signifikan mencapai angka Rp489.584.792.210 atau sebesar 65,3 persen dibandingkan tahun 2021. Kondisi ini berhasil memperlihatkan bahwa telah ditemukan adanya peningkatan banyaknya data jumlah koperasi yang masuk dalam penilaian yang aktif, namun kondisinya tanpa berhasil diimbangi dengan adanya peningkatan yang terjadi pada nilai jumlah SHU yang dihasilkan oleh lembaga koperasi dalam periode tertentu. Dimana dalam kondisi ini telah ditemukan adanya kasus atau fenomena yang dipicu atau disebabkan oleh munculnya permasalahan yang dialami secara oleh lembaga koperasi dimana salah satunya begitu rendahnya tingkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh lembaga koperasi. Berikut disajikan rekapitulasi data koperasi yang ada di Provinsi Bali, dimana data ini posisinya per Desember 2022.

Tabel 1.1 Data Koperasi Provinsi Bali Per Desember 2022

No	Kabupaten/ Kota	Koperasi		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Jembrana	215	67	282
2	Tabanan	414	162	576
3	Badung	543	66	609
4	Gianyar	865	420	1285
5	Klungkung	129	28	157
6	Bangli	202	40	242
7	Karangasem	231	124	355
8	Buleleng	330	81	411
9	Denpasar	1018	135	1153
10	Binaan Provinsi	313	11	324
Jumlah		4.260	1.134	5.394

Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali, 2023

Mengacu pada data yang ditampilkan pada Tabel 1.1, maka dapat dipahami bahwa dari sembilan kabupaten/kota dan koperasi binaan provinsi, maka

lembaga koperasi paling banyak berdiri di daerah kawasan Kab. Gianyar dengan datanya mencapai sebanyak 1.285 koperasi atau sebesar 24 persen dari keseluruhan koperasi yang ada di Provinsi Bali. Banyaknya jumlah koperasi di Kabupaten Gianyar tentunya membuat koperasi di Gianyar hendak melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, sehingga hal ini mampu untuk dipakai menjadi contoh bagi daerah kawasan kabupaten/kota lainnya. Namun, terdapat permasalahan yang dalam hal ini telah terjadi bahwa ditemukan dari 1.285 koperasi yang ada di Gianyar terdapat 420 koperasi yang telah tidak aktif. Secara persentase, Koperasi yang tidak aktif di Kabupaten Gianyar sebesar 33 persen dari seluruh Koperasi yang ada di Gianyar.

Banyaknya koperasi tidak aktif terjadi karena dinilai lemahnya proses pengelolaan keuangan yang dalam hal ini dilakukan oleh para pihak pengurus lembaga koperasi dan proses pembuatan dan juga penyusunan laporan keuangan yang dilakukan menghasilkan hasil yang kurang memiliki kualitas. Dalam kondisi ini telah ditemukan adanya begitu banyak faktor yang telah memicu atau juga menjadi penyebab lembaga koperasi kondisi atau keadaannya menjadi sakit hingga pada akhirnya harus menerima keadaan atau kondisinya gulung tikar ialah hal ini dipicu mulai dari faktor yang sumbernya secara internal dan juga sumbernya secara eksternal. Dengan demikian, maka disebutkan faktor sumbernya secara internal biasanya sebab adanya melakukan kelalaian yang dilakukan secara langsung oleh para pihak pengurus lembaga koperasi, sedangkan faktor sumbernya secara eksternal biasanya sebab ditemukan begitu banyak para

nasabah yang kreditnya berada dalam penilaian yang macet atau adanya kesulitan dalam melakukan proses pembayaran kredit (Rastana, 2022).

Kabupaten Gianyar sebagai kabupaten dengan jumlah koperasi terbanyak di Bali tentunya harus memperhatikan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh koperasi. Dimana hal ini dapat diperhatikan dari hasil yang didapatkan oleh lembaga koperasi dalam bentuk sisa hasil usaha (SHU) yang telah berhasil dihasilkan dalam periode Desember 2022 yang angkanya telah mencapai Rp24.048.696.286 dengan jumlah volume usaha yang angkanya mencapai Rp1.203.836.210.997. Pada saat hal ini dipandang dari jumlah SHU yang dicapai pada tahun 2022, maka Kab.Gianyar posisinya yang menempati peringkat ketiga dari sembilan kabupaten/kota lainnya. Pencapaian ini tentunya sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah koperasi di Gianyar dengan secara kuantitas dianggap paling begitu banyak dibandingkan dengan daerah kawasan kabupaten/kota lainnya yang ada di pulau Bali ini. Oleh karena itu, Koperasi di Kabupaten Gianyar tentunya perlu memperhatikan mengenai pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan dengan berdasarkan pada peraturan yang sedang berlaku.

Ditemukan adanya kasus atau masalah yang tepatnya hal ini terjadi pada lembaga koperasi yang ada di daerah kawasan Kab. Gianyar yang telah menimpa KSU Grya Anyar Sari Boga yang dimana dalam kasus ini telah terjadi tindakan atau perbuatan penggelapan yang secara langsung dilakukan oleh pihak Manajer Simpan Pinjam yang telah memicu atau menyebabkan adanya kerugian yang dialami oleh lembaga koperasi ini yang nilai kerugian ditafsirkan angkanya

mencapai 5,4 miliar rupiah. Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pihak tersangka ini telah lebih mudah dilakukan, sebab pihak ini memiliki posisi sebagai Manajer yang dimana posisinya memiliki kewenangan dalam melakukan kegiatan penyimpanan dan juga melakukan proses pengeluaran sejumlah dana pada keuangan KSU yang ada pada bagian unit simpan pinjam. Dalam kasus ini, maka pihak tersangka melakukan usaha atau upaya menutupi tindakan atau perbuatan kecurangannya ini dengan cara membuat dan juga menyusun laporan pembukuan unit simpan pinjam tepatnya per Desember 2019 yang telah melakukan kegiatan proses memanipulasi data-data laporan dengan mencakup laporannya yang berupa laporan lajur neraca, laporan penabung sukarela, laporan penabung berjangka, dan laporan piutang serta juga laporan kas (Gunarta, 2022).

Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) memiliki peran dalam melakukan pengembangan koperasi. Dekopinda Gianyar dalam hal ini telah menyatakan bahwa kasus atau permasalahan lembaga koperasi terkait control dan yang wajib untuk ditaruh titik fokusnya ialah dalam aspek kualitas yang ada pada SDM. Guna melakukan perubahan pada paradigma yang dimana agar proses pengelolaan dari cara manual mengarah pada perubahan pengelolaan yang dilakukan dengan secara digitalisasi. Dengan adanya kemajuan pada aspek bidang IT, maka hal ini wajib diupdate sebab segala kegiatan transaksi akan mulai beralih ke cara secara non tunai. Dalam kesempatan ini juga disampaikan bahwa Kadis Koperasi UMK yang ada di daerah kawasan Kab. Gianyar memiliki harapan agar lembaga koperasi mampu melakukan beradaptasi atau menyesuaikan dan juga mengikuti perkembangan jaman yang secara khususnya di dalam aspek bidang IT.

Dalam kondisi selama ini, maka dinilai SDM yang dimiliki oleh lembaga koperasi belum mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip atau nilai-nilai koperasi dengan secara optimal dan juga secara mendalam, sehingga hal inilah yang dinilai begitu sering memicu terjadinya kekeliruan dalam melakukan proses kegiatan pengelolaan keuangan.

Keberhasilan atau kesuksesan yang di capai oleh lembaga koperasi dalam hal ini begitu sangat bergantung pada tingkat kinerja yang diberikan oleh para anggotanya baik dalam segi aspek melakukan peningkatan keuangan maupun dalam segi aspek melakukan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan (Rifany & Anik, 2021). Dipahami bahwa maksud dari laporan keuangan, maka sebagaimana telah berhasil tercantum di dalam Pernyataan Standar Akuntansi ialah dimana telah menawarkan informasi yang ada hubungan ataupun kaitannya tentang kondisi atau keadaan keuangan, tingkat kinerja keuangan yang mampu dihasilkan dan juga kondisi atau keadaan arus kas yang dimana hal ini begitu sangat berguna atau bermanfaat bagi sebagai besar para pihak pengguna laporan pada saat melakukan proses penentuan atau pengambilan keputusan ekonomi.

Dipahami dalam hal ini bahwa kualitas informasi telah merujuk atau mengacu pada tingkat kapasitasnya guna menumbuhkan atau meningkatkan rasa kepercayaan bahwa laporan itu dinilai mampu akurat atau dalam hal ini mampu diandalkan. Laporan keuangan yang memiliki atau menghasilkan kualitas yang baik ialah dinilai informatif, dinilai juga mampu bebas dari klaim-klaim atau asumsi-asumsi yang menyesatkan dan juga menimbulkan adanya kesalahan yang bersifat secara substansial, mudah untuk dipahami atau dimengerti dan tentunya

tingkat keandalannya tinggi serta juga dilakukan penyusunan dan juga penyajian dengan secara jujur tentang hal-hal apa yang wajib atau dalam hal ini dinilai mungkin cukup guna selanjutnya diantisipasi untuk ditampilkan dalam laporan yang terkait (Anam & Fransiska, 2022).

Diketahui bahwa begitu banyaknya aspek faktor yang dianggap mampu menjadi pemicu atau dalam kondisi ini memberikan kontribusi pengaruhnya yang arahnya pada tingkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh lembaga koperasi, diantaranya ialah mencakup variabel pemahaman akuntansi, variabel teknologi informasi, variabel kompetensi SDM dan juga variabel penerapan peraturan Menteri Koperasi UKM yang dipakai sebagai acuan melakukan pengaturan tentang melakukan proses kegiatan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga koperasi. Dalam melakukan proses kegiatan penyusunan laporan keuangan, maka dalam hal ini tentunya wajib memiliki pemahaman akuntansi yang dianggap hal ini menjadi begitu sangat penting untuk dimiliki.

Diketahui bahwa pemahaman akuntansi dalam hal ini dinilai sebagai sesuatu yang dipahami atau mengerti pada mengenai bagaimana melakukan kegiatan proses akuntansi yang diawali dari melakukan proses atau tahapan pencatatan, melakukan proses atau tahapan pengklasifikasian, melakukan proses atau tahapan pengikhtisaran dan melakukan proses atau tahapan pelaporan transaksi yang ada hubungan atau kaitannya dengan keuangan usaha yang pada akhir melakukan proses atau tahapan ini menjadi laporan keuangan serta mampu dipakai menafsirkan hasilnya (Wiarti, 2022). Dengan begitu, maka dipahami

bahwa pemahaman akuntansi mampu dinilai sebagai suatu tingkat kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk dipakai dalam mengenal dan juga dipakai memahami atau mengerti tentang hal-hal yang ada hubungannya dengan akuntansi (Meliani, 2022).

Pemahaman akuntansi yang dipunya oleh pegawai koperasi, maka dapat dipakai dalam mengoptimalkan tingkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dengan cara melakukan pengaplikasian standar-standar akuntansi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Seseorang yang dinilai telah memiliki pemahaman akuntansi tentu telah memahami standar akuntansi yang dipakai sebagai pedoman atau menjadi acuan di dalam melakukan proses pembuatan dan juga penyusunan laporan keuangan, sehingga dalam hal ini pemahaman ilmu akuntansi dinilai telah menjadi bagian yang paling penting dalam mendukung adanya peningkatan pada hasil kualitas laporan yang dihasilkan oleh lembaga. Pemahaman akuntansi yang dimaksudkan adalah pengurus koperasi khususnya bagian pembukuan memahami standar-standar akuntansi terkait koperasi, sehingga tidak terjadi kesalahan maupun kekeliruan pencatatan transaksi. Pemahaman akuntansi yang dimiliki oleh para pihak sebagai pengurus koperasi, maka dianggap memiliki peran yang sangat esensial dalam rangka melakukan pembuatan dan juga penyusunan laporan keuangan lembaga koperasi yang memiliki kualitas yang baik dan juga dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Stewardship theory dalam riset ini dijadikan sebagai landasan atau dasar dengan secara psikologi dan juga dengan secara sosiologi yang dalam hal ini telah dilakukan perancangan, dimana hal ini berguna para eksekutif yang dianggap

sebagai *steward* melakukan upaya atau usaha guna mewujudkan target atau yang menjadi sasarannya. Dalam hal ini, maka salah satu yang menjadi target atau sasaran lembaga koperasi ialah melakukan kegiatan RAT yang dimana kegiatan ini diselenggarakan tiap-tiap periode, dimana hal ini dilakukan guna sebagai usaha agar apa yang menjadi target atau sasarannya mampu diraih, maka lembaga koperasi dalam hal ini sangat diwajibkan mampu menyusun dan juga membuat laporan keuangan guna sebagai bentuk melakukan pertanggungjawabannya pada kegiatan usaha yang dimana hasilnya ini disampaikan pada saat diadakan kegiatan RAT. Pada saat semakin tingginya pemahaman akuntansi yang dimiliki pada saat melakukan proses penyusunan dan juga pembuatan laporan keuangan, maka hal ini tentunya mampu mendukung dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan yang mampu hasilnya juga semakin baik. Diketahui bahwa lembaga koperasi yang mempunyai para pegawai dengan tingkat pemahaman dalam aspek akuntansi yang baik, maka secara umum tentunya mampu melakukan proses kegiatan penyusunan dan juga pembuatan dan juga penyusunan laporan keuangan yang mampu memiliki kualitas yang dalam hal ini diselaraskan dengan standar akuntansi yang dipakai acuan yang telah secara resmi ditetapkan.

Riset yang diadakan dengan membahas mengenai pemahaman akuntansi yang dinilai mampu memberikan pengaruhnya pada kualitas laporan keuangan berhasil sudah sebelumnya dilaksanakan oleh Napisah & Vania (2019), Vanilda (2020), Utami et al., (2021), Amatiddiniyyah (2022), dan juga Meliani (2022) yang berhasil memberikan pembuktian bahwa pemahaman akuntansi menampilkan pengaruhnya yang hasilnya memiliki nilai arah positif dan juga nilai

arah signifikan pada kualitas laporan keuangan. Sementara riset yang diadakan oleh Atika et al., (2019), dan juga Putri et al., (2019) sebaliknya menemukan pembuktian yang berlainan bahwa pemahaman akuntansi tanpa menampilkan pengaruhnya yang hasilnya memiliki nilai arah signifikan pada kualitas laporan keuangan.

Selain variabel pemahaman akuntansi, maka diketahui saat ini teknologi informasi juga harus dimaksimalkan. Kita ketahui bahwa saat ini dunia telah mengalami perkembangan dalam bidang teknologi, sehingga segala aspek telah berbasis teknologi. Diketahui bahwa teknologi informasi dinilai sebagai suatu teknologi yang mampu dipakai guna memudahkan dalam melakukan proses pengolahan data, memudahkan dalam memproses, memudahkan dalam mendapatkan, memudahkan dalam menyusun, memudahkan dalam menyimpan serta juga memudahkan dalam memanipulasi data guna pada akhirnya menghasilkan informasi yang memiliki tingkat kualitas, relevan, akurat dan juga mampu secara tepat waktu yang pada nantinya informasi ini digunakan oleh para pihak pengguna yang memerlukan informasi ini guna sebagai acuan dalam menentukan dan juga mengambil keputusan (Meliani, 2022).

Dengan mampu melakukan pemanfaatan teknologi informasi dengan secara maksimal, maka hal ini akan mampu dipakai dalam memberikan kemudahan bagi seseorang guna menyelesaikan tugas-tugas dalam pekerjaannya dengan lebih cepat dan juga mampu dipakai dalam meminimalisir munculnya kesalahan. Dipahami bahwa teknologi informasi ini mampu dipakai dalam memudahkan melakukan proses pengolahan data yang dilakukan secara cepat,

lengkap dan juga mampu akurat, sehingga dalam hal ini mampu memberikan hasil dalam bentuk laporan yang memiliki kualitas dan juga adanya informasi yang sifatnya relevan. Dengan adanya pemanfaatan teknologi, maka hal ini dimaksudkan ialah terkait bagaimana para pihak pengurus koperasi mampu memakai system software yang mampu memudahkan dan juga membantunya dalam proses penyusunan atau pengerjaan laporan keuangan dengan secara lebih cepat dan juga mampu akurat.

Riset yang diadakan dengan membahas mengenai pemanfaatan teknologi informasi yang dinilai mampu memberikan pengaruhnya pada kualitas laporan keuangan berhasil sudah sebelumnya dilaksanakan oleh Mene (2018), Biis et al (2022), Meliani (2022), dan juga Hadis et al (2022) yang memperoleh hasil bahwa yang berhasil memberikan pembuktian bahwa pemanfaatan teknologi informasi menampilkan pengaruhnya yang hasilnya memiliki nilai arah positif dan juga nilai arah signifikan pada kualitas laporan keuangan. Sementara riset yang diadakan oleh Avriyanti (2018) dan Triwahyudi (2020) sebaliknya menemukan pembuktian yang berlainan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tanpa menampilkan pengaruhnya yang hasilnya memiliki nilai arah signifikan pada kualitas laporan keuangan.

Selain teknologi, maka kompetensi SDM juga dinilai memiliki peran yang sangat esensial dalam membantu melakukan pembuatan dan juga penyusunan laporan keuangan yang memiliki kualitas yang baik. Dalam hal ini, maka dijelaskan bahwa SDM dianggap sebagai orang yang akan menggunakan teknologi memiliki peran yang cukup vital sebab apabila tanpa adanya dukungan

dari SDM, maka sebaik apapun teknologi tanpa akan mampu dilakukan proses pengoperasian dengan baik. Guna agar mampu dalam hal ini adanya informasi keuangan yang dihasilkan memiliki manfaat dan juga peran yang penting, maka laporan keuangan wajib untuk dibuat dan juga disusun oleh pihak personal yang mampu memiliki kompetensi yang memadai guna dipakai melakukan proses pengelolaan keuangan dan melakukan alur kegiatan proses akuntansi (Triwahyudi, 2020). Keberadaan SDM dinilai penting sebab seluruh wewenang dan tanggungjawab berhubungan dengan SDM. Dijelaskan bahwa SDM yang berhasil memiliki pengetahuan dan juga memiliki pemahaman yang ada hubungan atau terkait tugas-tugasnya dalam menyelesaikannya dan juga menghasilkan hasil dalam bentuk laporan yang dalam hal ini telah mampu disiapkan dengan secara baik yang tepat pada waktunya (Rifany & Anik, 2021).

Diketahui bahwa dengan adanya kompetensi SDM di dalam hal pemakaian system maka pada saat melakukan proses kegiatan pembuatan dan penyusunan laporan keuangan, maka akan mampu menjadi lebih dihemat. Kondisi ini dapat terjadi dimana telah dipicu atau disebabkan oleh adanya SDM yang dalam hal ini telah mampu mempunyai pengetahuan dan juga pemahaman yang memadai pada hal-hal yang sudah dipahaminya atau telah dikuasainya dengan secara baik pada saat menyelesaikan tugas-tugasnya, sehingga pada saat melakukan proses penyusunan dan juga pembuatan laporan keuangan mampu untuk diselesaikan dengan lebih cepat dan juga mampu disajikan tepat di waktu yang secara tepat (Hamka et al 2023). Kompetensi SDM ini lebih mengarah

bagaimana pengurus koperasi dapat kompeten menyelesaikan pekerjaan melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman untuk pengembangan profesi keuangan.

Riset yang diadakan dengan membahas mengenai kompetensi SDM yang dinilai mampu memberikan pengaruhnya pada kualitas laporan keuangan berhasil sudah sebelumnya dilaksanakan oleh Avriyanti (2018), Pangestu et al (2019), Rifany & Anik (2021), Tengko et al (2022), dan juga Loveli et al (2022) yang memperoleh hasil bahwa yang berhasil memberikan pembuktian bahwa SDM menampilkan pengaruhnya yang arahnya pada kualitas laporan keuangan. Sementara riset yang diadakan oleh Animah et al (2020), dan Hainil et al (2021) yang menemukan bahwa SDM tanpa menampilkan pengaruhnya yang arahnya pada kualitas laporan keuangan.

Hasil temuan yang sudah berhasil dibuktikan sebelumnya, maka telah memberikan pembuktian hasil yang tanpa mampu konsisten yang dimana satu riset memberikan hasil temuannya yang berpengaruh sedangkan hasil temuan lainnya memberikan hasil yang tanpa berpengaruh. Dengan terjadinya kondisi inilah, maka begitu sangat diperlukan adanya variabel moderasi yang dipakai guna membantu dalam mengetahui sejauh mana tingkat pengaruhnya pada kualitas laporan keuangan. Berbicara masalah laporan keuangan koperasi tentunya berkaitan dengan Peraturan Menteri Koperasi yang fokusnya mengatur mengenai penyusunan laporan keuangan koperasi. Dijelaskan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh lembaga koperasi dalam hal ini mempunyai standar akuntansi yang dapat memunculkan adanya informasi yang membahas mengenai status keuangan yang memiliki kegunaan dan juga manfaat dalam mendukung

pengembangan usaha serta mampu juga dipakai sebagai alat dalam menentukan pengambilan dan penentuan keputusan yang dilakukan oleh pihak pengurus.

Dewan Standar Akuntansi (DSAK), maka tepatnya pada 23 Oktober 2010 telah melakukan penerbitan *Exposure Draft* (ED) yang membahas perihal Pencabutan PSAK No 27 yang adanya kaitan secara langsung tentang Akuntansi Perkoperasian. Hal ini telah berlandaskan pada dampak yang dimunculkan dengan secara konvergensi *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang dengan memunculkan arah pada apa yang menjadi keinginan atau kebutuhan dalam menarik standar akuntansi keuangan yang dipakai pada lembaga industri tertentu. Dengan hal ini, maka pihak Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melakukan penerbitan standar akuntansi keuangan untuk lembaga koperasi simpan pinjam (KSP) yang dapat diimplementasikan guna mendukung dalam peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan yang akan dihasilkan oleh lembaga koperasi. Dalam hal ini, maka landasan atau dasar pengaturan pembuatan dan juga penyusunan laporan keuangan yang dilakukan pada lembaga KSP berpatokan pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Standar Umum Akuntansi KSP.

Semua lembaga koperasi dalam hal ini seharusnya mengimplementasikan Peraturan Menteri Koperasi ini guna dijadikan sebagai dasar dalam melakukan kegiatan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan, sehingga pada akhirnya mampu memberikan hasil dalam bentuk laporan keuangan yang memiliki kualitasn yang lebih baik dan juga mampu secara informatif yang juga selaras dengan apa yang menjadi keinginan dan juga kebutuhan dari para pihak pengguna

laporan ini. Begitu banyak hasil temuan yang ada pada masa sebelumnya yang telah melakukan risetn yang membahas secara langsung mengenai pengaplikasian Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.13/Per/M.KUKM/IX/2015. Hasil temuan yang berhasil diraih oleh Rabbani et al (2022) bahwa dalam hal ini laporan keuangan yang telah ditampilkan oleh pihak KPPP JABAR ialah dalam bentuk berupa Neraca dan juga PHU dari jumlah keseluruhannya telah mampu disajikan dalam penilaian yang dinilai cukup baik. Dalam hal ini, maka Laporan keuangan KPPP JABAR yang sudah ditampilkan masih belum mampu selaras dengan elemen atau komponen laporan keuangan yang seharusnya adanya yang berlandaskan pada pedoman akuntansi simpan pinjam.

Hasil riset yang didapatkan oleh Hasyim & Hanny (2022), maka memberikan hasil dengan penjelasan bahwa Koperasi Mitra Usaha belum mampu dalam menjalankan kegiatan usahanya memakai aturan pelaporan koperasi yang dilakukan dengan secara lengkap yang telah diajurkan untuk diterapkan seperti yang ada di dalam Permen KUKM No. 13 Tahun 2015 yang membahas secara langsung Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Dengan masih dinilai kurang atau minimnya melakukan pengaplikasian Peraturan Menteri Koperasi UKM No. 13 Tahun 2015 dalam melakukan proses pembuatan atau penyusunan laporan lembaga koperasi, maka tentunya hal ini telah dinilai menjadi hal hal yang sangat perlu memperoleh perhatian yang lebih sebagai bentuk upaya atau usaha menghasilkan laporan keuangan yang memiliki tingkat kualitas yang baik. Selain itu, maka hasil dari laporan yang dibuat selaras

dengan pemaparan aspek yang memunculkan permasalahan yang telah berhasil diuraikan bahwa koperasi yang ada di daerah kawasan Kab. Gianyar dinilai telah masih menjadi perhatian dalam aspek SDM yang melakukan kegiatan pengelolaan keuangan dan juga dinilai betapa rendah dan minimnya melakukan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, maka hal ini yang begitu kuat memicu dan juga mendorong pihak peneliti guna melakukan riset dengan mengangkat judul ialah **“Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Penerapan Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 13 Tahun 2015 Sebagai Pemoderasi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Mengacu pada pemaparan yang ada di dalam bagian latar belakang masalah sebelumnya, maka pihak peneliti dalam kesempatan ini berhasil melakukan proses dapat identifikasi beberapa permasalahan yang diangkat dalam riset ini, ialah ditemukan begitu masih banyak lembaga koperasi yang belum mampu mengimplementasikan Peraturan Menteri Koperasi UKM No. 13 Tahun 2015 yang membahas secara langsung Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dalam melakukan pembuatan dan juga penyusunan laporan keuangan, sehingga hal inilah yang memicu atau yang memunculkan dampaknya masih ditemukan minimnya laporan keuangan yang dimiliki oleh lembaga koperasi yang belum mampu berkualitas dan juga informatif dalam dipakai menentukan pengambilan keputusan.

Berdasarkan data diketahui bahwa di Bali telah banyak terdapat Koperasi. Namun, dari keseluruhan koperasi yang ada diketahui terdapat 21 persen telah dinyatakan tidak aktif. Kabupaten Gianyar merupakan kabupaten di Bali dengan jumlah koperasi terbanyak. Namun, terdapat permasalahan yang terjadi bahwa dari 1.285 koperasi yang ada di Gianyar terdapat 420 koperasi yang telah tidak aktif. Secara persentase, Koperasi yang tidak aktif di Kabupaten Gianyar sebesar 22 persen dari seluruh Koperasi yang ada di Gianyar. Banyaknya koperasi tidak aktif terjadi sebab dalam hal ini lemahnya melakukan kegiatan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan dan juga pembuatan dan juga penyusunan laporan keuangan yang kurang dinilai hasilnya memiliki kualitas.

Selain banyaknya koperasi yang tidak aktif, permasalahan pengelolaan keuangan juga terjadi pada koperasi di Gianyar, Dekopinda dan Dinas Koperasi UKM Gianyar menyoroti bahwa kompetensi SDM yang dalam hal ini sangat perlu dioptimalkan dengan adanya pemakaian digitalisasi atau juga teknologi informasi yang mampu memberikan dukungan dan juga menunjang lembaga koperasi guna melakukan kegiatan operasional dengan mampu lebih lancar dan juga baik serta juga mampu melakukan proses pembuatan dan juga penyusunan laporan keuangan yang secara tersistem yang selaras dengan aturan yang ditemukan di dalam standar akuntansi keuangan.

1.3 Batasan Masalah

Riset yang dilakukan pada kesempatan ini hanya membahas hal-hal yang adanya hubungannya mengenai kualitas laporan keuangan yang telah memperoleh pengaruh dari aspek variabel yang mencakup adanya pemahaman akuntansi,

pemanfaatan teknologi informasi dan juga kompetensi SDM dengan melakukan pengimplementasian peraturan Menteri Koperasi UKM No, 13 Tahun 2015 untuk dijadikan sebagai pemoderasi. Cara ini dilakukan oleh pihak peneliti dengan adanya maksud atau tujuan agar riset ini hanya menaruh perhatiannya pada satu permasalahan juga pada aspek yang dinilai memunculkan keterbatasan, dimana metode yang dipakai oleh pihak peneliti dalam riset ini ialah hanya memakai metode kuantitatif dan berpatokan pada jangka waktu riset yang terbatas dengan adanya kebijakan data keuangan yang dipunyai oleh pihak lembaga koperasi.

1.4 Rumusan Masalah

Merujuk pada pemaparan bagian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka ditemukan adapun yang menjadi permasalahan yang akan dibahas oleh pihak peneliti dalam risetnya ini, ialah mencakup:

- 1.4.1 Apakah pemahaman akuntansi memunculkan pengaruhnya yang mengarah pada hasil yang positif pada kualitas laporan keuangan?
- 1.4.2 Apakah pemanfaatan teknologi informasi memunculkan pengaruhnya yang mengarah pada hasil yang positif pada kualitas laporan keuangan?
- 1.4.3 Apakah kompetensi SDM memunculkan pengaruhnya yang mengarah pada hasil yang positif pada kualitas laporan keuangan?
- 1.4.4 Apakah dengan adanya melakukan penerapan Peraturan Menteri Koperasi UKM No. 13 Tahun 2015 mampu dalam hal ini memperkuat pengaruh pemahaman akuntansi pada kualitas laporan keuangan?

- 1.4.5 Apakah dengan adanya melakukan penerapan Peraturan Menteri Koperasi UKM No. 13 Tahun 2015 mampu dalam hal ini memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi pada kualitas laporan keuangan?
- 1.4.6 Apakah dengan adanya melakukan penerapan Peraturan Menteri Koperasi UKM No. 13 Tahun 2015 mampu dalam hal ini memperkuat pengaruh kompetensi SDM pada kualitas laporan keuangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Merujuk pada pemaparan bagian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka ditemukan adapaun yang menjadi maksud atau tujuan yang akan dibahas oleh pihak peneliti dalam risetnya ini, ialah mencakup:

- 1.5.1 Untuk dipakai oleh pihak peneliti dalam melakukan proses analisis terkait pengaruh yang dimunculkan oleh pemahaman akuntansi pada kualitas laporan keuangan.
- 1.5.2 Untuk dipakai oleh pihak peneliti dalam melakukan proses analisis terkait pengaruh yang dimunculkan oleh pemanfaatan teknologi informasi pada kualitas laporan keuangan.
- 1.5.3 Untuk dipakai oleh pihak peneliti dalam melakukan proses analisis terkait pengaruh yang dimunculkan oleh kompetensi SDM pada kualitas laporan keuangan.
- 1.5.4 Untuk dipakai oleh pihak peneliti dalam melakukan proses analisis terkait moderasi atas adanya penerapan Peraturan Menteri Koperasi UKM No. 13

Tahun 2015 atas pengaruh yang dimunculkan oleh pemahaman akuntansi pada kualitas laporan keuangan.

1.5.5 Untuk dipakai oleh pihak peneliti dalam melakukan proses analisis terkait moderasi atas adanya penerapan Peraturan Menteri Koperasi UKM No. 13

Tahun 2015 atas pengaruh yang dimunculkan oleh pemanfaatan teknologi informasi pada kualitas laporan keuangan.

1.5.6 Untuk dipakai oleh pihak peneliti dalam melakukan proses analisis terkait moderasi atas adanya penerapan Peraturan Menteri Koperasi UKM No. 13

Tahun 2015 atas pengaruh yang dimunculkan oleh kompetensi SDM pada kualitas laporan keuangan.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari mengadakan ketiatan riset ini, maka adanya terkadung harapan mampu adanya pemberian beberapa manfaat bagi para pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya, ialah:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Dengan secara teoritis, maka Hasil dari mengadakan ketiatan riset ini, maka adanya terkadung harapan mampu adanya pemberian tambahan referensi pada pemakaian teori yang membahas apa yang ada dalam riset ini ialah mengenai kualitas laporan keuangan dalam melakukan proses pengkajian pada pengaruhnya dengan aspek variabel yang mencakup pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan juga kompetensi SDM dengan adanya berisikan penerapan Peraturan Menteri Koperasi No 13 Tahun 2015 guna dijadikan sebagai pemoderasi.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Koperasi

Hasil dari mengadakan ketiatan riset ini, maka adanya terkandung harapan mampu adanya pemberian manfaat bagi para pihak sebagai auditor dalam melakukan usaha atau upayanya meningkatkan tingkat kualitas laporan keuangan dengan cara mengimplementasikan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 13 Tahun 2015 yang membahas secara langsung Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari mengadakan ketiatan riset ini, maka adanya terkandung harapan mampu adanya pemberian tambahan referensi bagi para pihak peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan atau hendak meneliti terkait kualitas laporan keuangan yang ada di lembaga koperasi.

1.7 Penjelasan Istilah

Penjelasan – penjelasan yang dipaparkan dalam tulisan tesis ini, maka telah ditemukan adanya beberapa istilah atau juga singkatan yang dapat dijelaskan dibawah ini yang mencakup, ialah:

- 1) DSAK : Dewan Standar Akuntansi
- 2) IFRS : *International Financial Reporting Standards*
- 3) SDM : Sumber Daya Manusia
- 4) PHU : Perhitungan Hasil Usaha
- 5) RAT : Rapat Anggota Tahunan

6) KUKM : Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1.8 Asumsi Penelitian

Asumsi atau dinilai sebagai anggapan yang ada dalam riset ini ini ialah dinilai sebagai suatu gambaran yang mampu dipakai dalam menyajikan perkiraan, satu tanggapan ataupun pendapat atau juga kesimpulan yang sifanya sementara atau suatu teori sementara yang belum adanya melakukan pembuktian. Mengacu pada penjelasan ini, maka asumsi yang ada dalam penulisan riset ini ialah variabel yang mencakup pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan juga kompetensi SDM memunculkan hasil dengan adanya ditemukan pengaruh yang arahnya pada kualitas laporan keuangan.

Dengan adanya melakukan Penerapan Peraturan Menteri Koperasi UKM No. 13 Tahun 2015, maka dinilai berhasil memoderasi pengaruh atas variabel yang mencakup pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi SDM yang arahnya pada kualitas laporan keuangan.

1.9 Rencana Publikasi

Hasil dari penulisan tesis ini, maka pihak peneliti telah memiliki tujuan guna direncanakan akan dipublikasikan pada situs Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA) Sinta 2.